PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN DALAM MENDUKUNG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KABUPATEN MUKOMUKO PROVINSI BENGKULU

Kellin Vasya Bahana Pringga
NPP. 33.0266
Program Studi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Email: kellinvasya@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Hj. Nunung Munawaroh, S.Ag.,M.Si
Email: nunung_m@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap): *The utilization of population data is an important aspect in supporting the accuracy of Family Hope Program (PKH) targeting, particularly in Mukomuko Regency, where mismatches in beneficiary data, duplicate records, and eligible households that have not been registered are still found. This condition indicates the need for accurate, updated, and integrated population data connected to the Integrated Social Welfare Data (DTKS).* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the utilization of population data in supporting the implementation of PKH in Mukomuko Regency, Bengkulu Province.* ***Method:*** *This study employed a descriptive qualitative approach with data collection techniques consisting of interviews, observation, and documentation. Informants were selected purposively, including officials from the Population and Civil Registration Office, the Social Affairs Office, PKH facilitators, and Beneficiary Families (KPM). The data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model, supported by NVivo software and based on Chin and Todd's Perceived Usefulness Theory.* ***Result:*** *The findings show that the use of National Identification Numbers (NIK), Family Cards (KK), and DTKS facilitates data collection, accelerates verification, increases officers' productivity, and strengthens the accuracy of beneficiary targeting in the field. However, several obstacles remain, including low community participation in data updating and suboptimal inter-agency synchronization.* ***Conclusion:*** *The utilization of population data has supported the effectiveness of PKH implementation, but it needs to be strengthened through public outreach, inter-agency coordination, and regular data monitoring to ensure that social assistance becomes more accurate, well-targeted, and sustainable in Mukomuko Regency.*
Keywords: *Family Hope Program, Population Data, Povert*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Pemanfaatan data kependudukan menjadi aspek penting dalam mendukung ketepatan sasaran Program Keluarga Harapan (PKH), khususnya di Kabupaten Mukomuko yang masih menghadapi persoalan ketidaksesuaian data penerima bantuan, data ganda, serta masyarakat layak menerima bantuan yang belum terdata. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya integrasi data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan terhubung dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan data kependudukan dalam mendukung pelaksanaan PKH di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih secara

purposive, meliputi unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, pendamping PKH, serta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang didukung aplikasi NVivo berdasarkan Teori Kemanfaatan Chin dan Todd. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan NIK, Kartu Keluarga, dan DTKS mempermudah pendataan, mempercepat verifikasi, meningkatkan produktivitas petugas, serta memperkuat ketepatan sasaran bantuan di lapangan. Namun, hambatan masih ditemukan berupa rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemutakhiran data dan belum optimalnya sinkronisasi antarinstansi. **Kesimpulan:** Pemanfaatan data kependudukan telah mendukung efektivitas PKH, tetapi perlu diperkuat melalui sosialisasi, koordinasi lintas instansi, dan pemantauan data secara berkala agar bantuan sosial semakin tepat sasaran dan berkelanjutan di Kabupaten Mukomuko.
Kata kunci: Data Kependudukan, Kemiskinan, Program Keluarga Harapan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang besar dan terus meningkat setiap tahun. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, rata-rata laju pertumbuhan penduduk Indonesia pada tahun 2025 mencapai sekitar 1,09% (BPS, 2025). Pertumbuhan penduduk berdampak pada meningkatnya kebutuhan dasar masyarakat, seperti pangan, sandang, dan papan. Apabila tidak diimbangi dengan perencanaan pembangunan yang tepat, kondisi ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan ekonomi, seperti pengangguran, keterbatasan layanan publik, kemiskinan, dan kesenjangan sosial (Hutasoit, 2017). Selain itu, pertumbuhan penduduk juga meningkatkan kebutuhan pangan, jumlah angkatan kerja, dan penduduk berisiko (Munawaroh et al., 2015).

Data Kabupaten Mukomuko menunjukkan bahwa jumlah penduduk meningkat dari 201.227 jiwa pada tahun 2023 menjadi 205.605 jiwa pada tahun 2024. Hampir seluruh kecamatan mengalami peningkatan jumlah penduduk. Kecamatan Penarik memiliki jumlah penduduk terbesar, yaitu meningkat dari 25.723 jiwa menjadi 26.303 jiwa, sedangkan Malin Deman merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk relatif kecil. Permasalahan yang berkaitan dengan pertumbuhan penduduk adalah kemiskinan. Pada Maret 2024, persentase penduduk miskin di Indonesia tercatat sebesar 9,03% (BPS, 2024). Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi dan memelihara fakir miskin serta menjamin terpenuhinya hak dasar warga negara melalui berbagai kebijakan pengentasan kemiskinan (UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 dan Pasal 28H ayat 1).

Di Kabupaten Mukomuko, jumlah penduduk miskin menunjukkan tren menurun. Pada tahun 2016 terdapat 23.000 penduduk miskin atau 12,68% dari total penduduk, sedangkan pada tahun 2024 jumlahnya menurun menjadi 21.000 jiwa atau 10,21%, meskipun jumlah penduduk terus meningkat. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan kondisi ekonomi dan efektivitas program pengentasan kemiskinan, walaupun jumlah penduduk miskin masih cukup signifikan (BPS Kabupaten Mukomuko, 2025). Pemerintah memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan melalui kebijakan dan program yang tepat sasaran. Dalam hal ini, data kependudukan berfungsi sebagai alat validasi untuk mendukung perencanaan pembangunan, peningkatan ekonomi, dan pelaksanaan program pemerintah secara efektif (Jaftoran et al., 2025). Data kependudukan yang akurat sangat penting karena ketidakakuratan data sering menjadi penyebab tidak tercapainya target program pemerintah (Sumual et al., 2024). Pemenuhan kebutuhan data tersebut memerlukan sistem informasi kependudukan yang baik (Hutasoit, 2017).

Data kependudukan juga menjadi dasar penyusunan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yaitu data yang memuat informasi penerima layanan kesejahteraan sosial dan sasaran program bantuan sosial (Permensos No. 3 Tahun 2021). Pentingnya ketepatan data sasaran diperkuat oleh penelitian Tohari et al. (2019) yang menunjukkan bahwa *Unified Targeting System* di Indonesia mampu meningkatkan efektivitas penargetan rumah tangga miskin sehingga program perlindungan sosial dapat berjalan lebih optimal. Koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Dinas Sosial diperlukan untuk mencegah tumpang tindih penerima bantuan dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran (Salsabila et al., 2024).

Pemerintah telah menjalankan berbagai program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), dan JKN-KIS sebagai upaya percepatan pengentasan kemiskinan (Kemenkeu, 2020). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa PKH memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Cahyadi et al. (2020) menemukan bahwa PKH menghasilkan dampak kumulatif yang signifikan terhadap peningkatan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rumah tangga penerima manfaat. Sementara itu, Bryan et al. (2023) menjelaskan bahwa bantuan tunai bersyarat mampu mendorong perubahan perilaku penerima sesuai tujuan program, meskipun tetap perlu memperhatikan kemungkinan distorsi dalam pelaksanaannya.

Efektivitas PKH juga terlihat pada sektor ekonomi rumah tangga. Yuliani dan Nasrudin (2024) menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan berkontribusi terhadap peningkatan mobilitas ekonomi rumah tangga dan membantu proses transisi tenaga kerja dari sektor pertanian berproduktivitas rendah menuju sektor yang lebih produktif. Selain itu, Fitrinitia dan Matsuyuki (2023) menemukan bahwa PKH berperan sebagai instrumen perlindungan sosial yang membantu rumah tangga petani kecil menghadapi risiko dan dampak bencana iklim sehingga memperkuat ketahanan ekonomi keluarga miskin.

Meskipun demikian, masih ditemukan berbagai permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial, seperti distribusi yang belum merata, ketidaktepatan sasaran, dan masyarakat yang layak menerima bantuan tetapi belum terdata (Salsabila et al., 2024). Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa ketidakakuratan data masih menjadi kendala utama dalam penyaluran bantuan sosial. Masih ditemukan keluarga yang sudah mampu tetapi tetap terdaftar dalam DTKS, sementara keluarga yang layak menerima bantuan justru belum terdata (Manoppo & Laoh, 2022; Sembiring & Nababan, 2024). Oleh karena itu, keterlibatan aktif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam verifikasi NIK dan validasi data sangat penting untuk memastikan kesesuaian antara data penduduk miskin dan penerima bantuan sosial.

Di Kabupaten Mukomuko, pemanfaatan data kependudukan dalam mendukung Program Keluarga Harapan (PKH) belum sepenuhnya optimal. Meskipun angka kemiskinan menurun dari 10,44% pada tahun 2023 menjadi 10,21% pada tahun 2024, masih ditemukan ketidaksesuaian data penerima bantuan. Pada tahun 2021, Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko menemukan ketidaksesuaian nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta data ganda pada penerima PKH dan BPNT, sehingga diperlukan verifikasi dan perbaikan data secara berkelanjutan (ANTARA News Bengkulu, 2021). Oleh karena itu, diperlukan analisis dan langkah strategis untuk mengoptimalkan pemanfaatan data kependudukan agar pelaksanaan PKH lebih akurat, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (*Research Gap*)

Penelitian ini berfokus pada permasalahan belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan dalam mendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Meskipun angka kemiskinan di Kabupaten Mukomuko menunjukkan tren penurunan, masih ditemukan berbagai persoalan dalam penyaluran bantuan sosial, seperti ketidaksesuaian antara nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), adanya data ganda penerima bantuan, serta perbedaan antara kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan data yang tercantum dalam basis data penerima manfaat. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan bantuan sosial tidak tepat sasaran dan mengurangi efektivitas program pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan pemanfaatan data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Dinas Sosial agar proses verifikasi, validasi, dan penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat berjalan lebih efektif.

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah membahas evaluasi bantuan sosial, efektivitas penyaluran bantuan, serta pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sebagian besar penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek penyaluran bantuan, strategi bantuan sosial, atau dampak bantuan terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian terdahulu belum secara khusus mengkaji bagaimana pemanfaatan data kependudukan sebagai basis utama dalam mendukung pelaksanaan PKH, termasuk mengidentifikasi hambatan pemanfaatan data serta upaya optimalisasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mendukung ketepatan sasaran bantuan sosial. Selain itu, kajian yang menghubungkan pemanfaatan data administrasi kependudukan dengan keberhasilan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Mukomuko masih sangat terbatas. Keterbatasan inilah yang menjadi celah penelitian (*research gap*) sehingga penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai peran data kependudukan dalam meningkatkan akurasi dan efektivitas pelaksanaan PKH.

1.3. Urgensi Penelitian

Berdasarkan masih ditemukannya ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial di Kabupaten Mukomuko, seperti perbedaan antara nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), data ganda penerima bantuan, serta adanya masyarakat yang layak menerima bantuan namun belum terakomodasi dalam Program Keluarga Harapan (PKH), penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran empiris mengenai pemanfaatan data kependudukan dalam mendukung ketepatan sasaran program bantuan sosial. Di tengah upaya pemerintah menekan angka kemiskinan dan meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan, keberadaan data kependudukan yang akurat menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan program. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko dalam memperkuat integrasi, validasi, dan pemutakhiran data penerima manfaat sehingga kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran dan efisien. Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka berbagai permasalahan terkait ketidakakuratan data berpotensi terus terjadi, menyebabkan bantuan sosial tidak diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan, menimbulkan tumpang tindih penerima bantuan, serta mengurangi efektivitas program pengentasan kemiskinan yang pada akhirnya dapat menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mukomuko..

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh berbagai penelitian terdahulu yang membahas administrasi kependudukan, pemanfaatan data kesejahteraan sosial, serta pelaksanaan program bantuan sosial. Ripa'i (2018) menjelaskan bahwa penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) berbasis teknologi informasi mampu mendukung terwujudnya *single identity number* sehingga meningkatkan akurasi dan integrasi data kependudukan. Ismail dan Ismail (2022) menemukan bahwa implementasi kebijakan pelayanan administrasi kependudukan yang baik berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan validitas data penduduk. Selanjutnya, Novella dan Mardhatillah (2022) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada pelayanan kependudukan dapat meningkatkan efektivitas serta efisiensi pengelolaan data kependudukan.

Herlambang dan Wicaksono (2025) mengkaji evaluasi kebijakan bantuan sosial di Kabupaten Jember dengan metode deskriptif kualitatif dan menemukan bahwa bantuan sosial berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, meskipun masih terdapat kendala dalam akurasi pendataan penerima bantuan. Pratiwi dan Imsar (2022) meneliti penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Batu Bara serta menyimpulkan bahwa program telah berjalan sesuai prosedur, namun memerlukan pembaruan data secara berkala agar bantuan lebih tepat sasaran. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Bakri et al. (2021) yang menunjukkan bahwa implementasi PKH di Kabupaten Bone telah berjalan cukup baik, tetapi masih memerlukan peningkatan validitas data, koordinasi, dan pengawasan program.

Penelitian Sembiring dan Nababan (2024) menunjukkan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran. Sementara itu, Suparman et al. (2021) menemukan bahwa efektivitas penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa masih menghadapi kendala berupa keterlambatan penyaluran, kurangnya transparansi, dan ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Penelitian Manoppo dan Laoh (2022) juga mengungkapkan masih adanya keluarga mampu yang tercantum dalam DTKS dan keluarga tidak mampu yang belum terdaftar akibat kurang optimalnya pembaruan data. Temuan ini diperkuat oleh Nurrahman et al. (2025) yang menyatakan bahwa program Identitas Kependudukan Digital (IKD) mampu meningkatkan akurasi data penduduk serta mendukung proses verifikasi identitas secara lebih efektif.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa akurasi data kependudukan, pemanfaatan teknologi informasi, pembaruan data secara berkala, dan koordinasi antarinstansi merupakan faktor penting dalam mendukung efektivitas program bantuan sosial. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai data kependudukan dan bantuan sosial, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang secara khusus mengkaji pemanfaatan data kependudukan dalam mendukung Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah dibandingkan penelitian-penelitian terdahulu karena secara khusus mengkaji pemanfaatan data kependudukan (NIK, KK, dan integrasinya dengan DTKS) dalam mendukung Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, yang belum menjadi fokus utama pada penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu umumnya membahas evaluasi kebijakan bantuan sosial, efektivitas penyaluran bantuan, pemanfaatan DTKS, maupun strategi penyaluran bantuan sosial pada berbagai program dan wilayah yang berbeda,

sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana data administrasi kependudukan dimanfaatkan untuk meningkatkan ketepatan sasaran PKH serta mengidentifikasi hambatan dan upaya optimalisasinya. Selain itu, dari aspek teoritis penelitian ini menggunakan Teori Kemanfaatan Chin dan Todd (1995) dengan lima dimensi, yaitu menjadikan pekerjaan lebih mudah, bermanfaat, menambah produktivitas, mempertinggi efektivitas, dan mengembangkan kinerja pekerjaan, yang berbeda dengan teori Anderson, Budiani, *Welfare State*, Makmur, maupun Wheelen dan Hunger yang digunakan pada penelitian sebelumnya. Dari aspek metodologis, penelitian ini juga menghadirkan kebaruan melalui pemanfaatan analisis kualitatif berbantuan aplikasi NVivo untuk mengkaji implementasi pemanfaatan data kependudukan dalam PKH secara lebih mendalam. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam kajian administrasi kependudukan dan perlindungan sosial melalui analisis integrasi data kependudukan sebagai dasar penentuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Kabupaten Mukomuko.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan data kependudukan dalam mendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana pemanfaatan data kependudukan dalam mendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali fenomena sosial secara komprehensif berdasarkan pengalaman, pandangan, dan pemahaman para pelaku yang terlibat secara langsung dalam proses pemanfaatan data kependudukan (Sugiyono, 2024). Penelitian dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko serta Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko sebagai instansi yang memiliki peran utama dalam penyediaan, pemanfaatan, dan verifikasi data kependudukan untuk pelaksanaan PKH. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, kewenangan, dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan data kependudukan maupun pelaksanaan PKH. Informan terdiri atas Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin, Sub Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Pendamping PKH, serta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan karena memiliki tugas dan kewenangan yang berkaitan langsung dengan pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung berbagai program pemerintah, termasuk Program Keluarga Harapan. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang akurat dan menyeluruh mengenai pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan dalam program PKH.

Pengujian keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, pendamping PKH, serta Keluarga Penerima

Manfaat (KPM), sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles & Huberman, 2014). Untuk mendukung proses analisis, penelitian ini juga memanfaatkan aplikasi NVivo sehingga data hasil wawancara dapat diklasifikasikan, dikodekan, dan divisualisasikan secara sistematis sesuai dengan dimensi teori kemanfaatan Chin dan Todd (1995). Penelitian dilaksanakan selama tahun akademik 2025–2026 dengan kegiatan yang meliputi penyusunan proposal, pengumpulan data lapangan, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian. Pengumpulan data lapangan dilakukan di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, khususnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko serta Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko sebagai lokus penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pemanfaatan Data Kependudukan dalam Mendukung Program Keluarga Harapan di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu

Pemanfaatan data kependudukan berperan penting dalam mendukung Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Data kependudukan yang akurat, lengkap, dan mutakhir menjadi dasar perencanaan program serta memastikan bantuan sosial diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya. Informasi kependudukan seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, susunan anggota keluarga, dan kondisi ekonomi digunakan untuk mengidentifikasi keluarga yang memenuhi kriteria penerima PKH. Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengatasi permasalahan pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Gambar 1.
Analisis Data Nvivo Teori Kemanfaatan

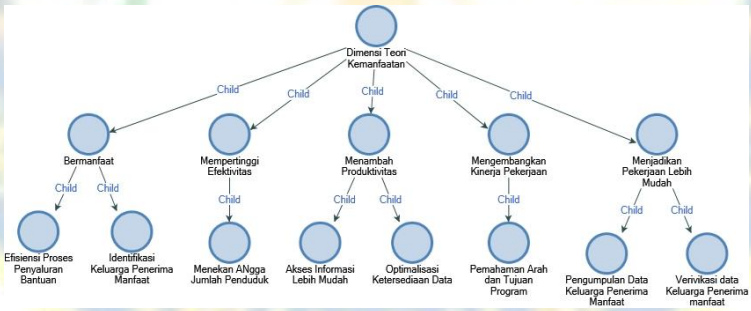

Sumber : diolah penulis, 2026

Berdasarkan Gambar 1. hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan data kependudukan dalam mendukung PKH dapat dianalisis menggunakan Teori Kemanfaatan Chin dan Todd (1995). Terdapat lima dimensi utama, yaitu bermanfaat, mempertinggi efektivitas, menambah produktivitas, mengembangkan kinerja pekerjaan, dan menjadikan pekerjaan lebih mudah. Data kependudukan tidak hanya berfungsi sebagai data administrasi, tetapi juga membantu pelaksanaan PKH menjadi lebih mudah, cepat, produktif, efektif, dan tepat sasaran.

3.1.1 Menjadikan Pekerjaan Lebih Mudah

Dimensi menjadikan pekerjaan lebih mudah dalam Teori Kemanfaatan Chin dan Todd (1995) terdiri dari dua indikator, yaitu pengumpulan data keluarga penerima manfaat dan verifikasi data keluarga penerima manfaat.

1) Pengumpulan Data Keluarga Penerima Manfaat

Pengumpulan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Kementerian Sosial. Pendataan dilakukan untuk mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan yang layak menerima bantuan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pendataan KPM memanfaatkan data kependudukan seperti NIK, Kartu Keluarga (KK), dan DTKS sebagai acuan utama. Data yang telah terdigitalisasi dan terintegrasi dengan Dukcapil memudahkan petugas dalam proses pendataan melalui aplikasi SIKS-NG, sehingga identifikasi calon penerima bantuan menjadi lebih cepat, sistematis, dan meminimalisasi kesalahan.

2) Verifikasi Data Keluarga Penerima Manfaat

Verifikasi data KPM merupakan tahapan penting untuk memastikan ketepatan sasaran bantuan sosial. Dinas Sosial dan Dukcapil melakukan kerja sama melalui pencocokan data lapangan dengan *database* kependudukan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa proses verifikasi dilakukan dengan memastikan kesesuaian NIK, alamat, dan status dalam Kartu Keluarga. Kerja sama ini membantu meminimalisasi kesalahan data, duplikasi penerima, serta inclusion dan *exclusion error* sehingga penyaluran bantuan menjadi lebih akurat.

Gambar 2.

Word Cloud Nvivo Dimensi Menjadikan Pekerjaan Lebih Mudah

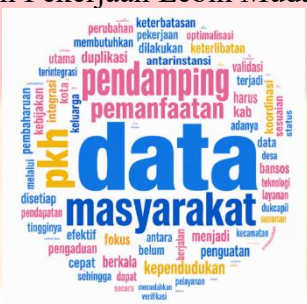

Sumber: diolah oleh penulis, 2026

Berdasarkan Gambar 2. hasil analisis menunjukkan kata-kata dominan seperti data, masyarakat, PKH, pemanfaatan, dan pendamping. Dominasi kata tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan data kependudukan memiliki hubungan erat dengan pelaksanaan PKH dalam memastikan bantuan sosial tersalurkan kepada masyarakat yang berhak. Data kependudukan yang valid, mutakhir, dan terintegrasi mempermudah proses pendataan, mempercepat verifikasi, meminimalisasi kesalahan, serta meningkatkan ketepatan sasaran bantuan PKH di Kabupaten Mukomuko. Dengan demikian, data kependudukan berfungsi sebagai instrumen penting dalam mendukung efektivitas program kesejahteraan sosial.

3.1.2 Bermanfaat

Dimensi bermanfaat menekankan pentingnya pemanfaatan data kependudukan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Data kependudukan yang akurat berperan dalam mengidentifikasi keluarga yang memenuhi kriteria penerima PKH sehingga kesalahan penyaluran bantuan dapat diminimalkan dan bantuan tersalurkan secara tepat sasaran.

1) Identifikasi Keluarga Penerima Manfaat

Identifikasi keluarga penerima manfaat bertujuan memastikan bantuan diberikan kepada keluarga miskin dan rentan yang memenuhi kriteria, seperti aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Data kependudukan yang valid dan mutakhir membantu meminimalkan *inclusion error* maupun *exclusion error*. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ditetapkan berdasarkan data DTKS dengan kategori keluarga miskin desil 1–4 yang

memiliki komponen ibu hamil, balita, anak sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas. Data dari Dukcapil sangat membantu Dinas Sosial dalam menentukan penerima bantuan secara tepat sasaran.

Tabel 1.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Mukomuko Desil 1–10 Tahun 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA
1.	Lubuk Pinang	4.928
2.	Kota Mukomuko	5.954
3.	Teras Terunjam	2.680
4.	Pondok Suguh	4.642
5.	Ipuh	6.115
6.	Malin Deman	2.269
7.	Air Rami	4.523
8.	Teramang Jaya	4.127
9.	Selagan Raya	3.465
10.	Penarik	8.388
11.	XIV Koto	4.661
12.	V Koto	2.581
13.	Air Manjuto	4.004
14.	Air Dikit	2.331
15.	Sungai Rumbai	3.260
Jumlah		**63.928**

sumber: Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko, 2025

Berdasarkan Tabel 1. jumlah keluarga yang terdaftar dalam DTKS Kabupaten Mukomuko tahun 2025 sebanyak 63.928 keluarga. Kecamatan Penarik memiliki jumlah keluarga DTKS terbanyak yaitu 8.388 keluarga, sedangkan Malin Deman memiliki jumlah paling sedikit yaitu 2.269 keluarga.

Tabel 2.

Data KPM Penerima Bansos PKH Desil 1 s.d. 4 Per Kecamatan Kabupaten Mukomuko Tahun 2021–2025

NO	KECAMATAN	TAHUN/JUMLAH KPM - PKH				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Air Dikit	272	258	193	218	345
2.	Air Rami	600	564	528	576	896
3.	Air Manjunto	675	639	666	765	1146
4.	Ipuh	610	579	542	607	943
5.	Kota Mukomuko	504	519	549	655	1005
6.	Lb Pinang	514	508	551	707	958
7.	Malin Deman	471	443	420	325	471
8.	Penarik	789	722	626	915	1330
9.	Pondok Suguh	367	348	340	369	626
10.	Selagan Raya	694	673	667	602	902
11.	Sei Rumbai	299	295	285	423	528
12.	Teramang Jaya	405	399	358	409	709
13.	Teras Terunjam	323	303	311	536	469
14.	V Koto	527	477	392	322	589
15.	XIV Koto	596	599	524	669	1000
JUMLAH KPM		**7646**	**7286**	**6952**	**8098**	**11917**

Sumber: Rencana Strategis Dinas Sosial Kab. Mukomuko 2021- 2026

Berdasarkan Tabel 2. jumlah KPM penerima PKH tahun 2025 mencapai 11.917 keluarga. Kecamatan Penarik memiliki jumlah penerima PKH tertinggi sebanyak 1.330 KPM, sedangkan Air Dikit sebanyak 345 KPM. Data ini menunjukkan bahwa DTKS menjadi dasar utama dalam penetapan penerima berbagai bantuan sosial, termasuk PKH, BPNT, KIP, KIS, dan program bantuan lainnya. Kecamatan Air Manjunto memiliki 1.146 penerima PKH dari 4.004 keluarga yang terdaftar dalam DTKS. Hal ini menunjukkan bahwa DTKS menjadi dasar utama penetapan penerima berbagai program bantuan sosial, tidak hanya PKH tetapi juga BPNT, KIP, KIS, dan program bantuan lainnya.

2) Efisiensi Proses Penyaluran Bantuan

Efisiensi penyaluran bantuan PKH diatur dalam Permensos Nomor 1 Tahun 2018 melalui mekanisme penyaluran non tunai menggunakan rekening bank atas nama KPM. Sistem ini mempercepat distribusi bantuan, mengurangi kesalahan administrasi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pendamping PKH memiliki peran penting dalam memastikan KPM memahami hak dan kewajibannya serta membantu proses pencairan bantuan. Namun, masih terdapat tantangan dalam menjaga ketepatan sasaran penerima bantuan, salah satunya karena adanya kedekatan antara masyarakat dan petugas pendataan yang berpotensi menimbulkan bias dalam proses verifikasi data.

Hasil wawancara dengan penerima manfaat menunjukkan bahwa bantuan PKH sangat membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan diharapkan terus diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Gambar 3.

Word Cloud Nvivo Dimensi Bermanfaat



Sumber : diolah oleh penulis,2026

Berdasarkan Gambar 3. kata-kata yang paling dominan adalah kependudukan, data, membantu, dukcapil, bantuan, dan sangat. Dominasi kata tersebut menunjukkan bahwa data kependudukan memiliki manfaat yang besar dalam mendukung pelaksanaan PKH, terutama dalam menentukan penerima bantuan secara tepat sasaran. Dukcapil berperan sebagai penyedia data dasar yang digunakan dalam proses identifikasi dan penetapan penerima manfaat. Dengan demikian, data kependudukan tidak hanya berfungsi sebagai data administrasi, tetapi juga memberikan manfaat nyata dalam mendukung ketepatan, kelancaran, dan keberhasilan pelaksanaan PKH di Kabupaten Mukomuko.

3.1.3 Menambah Produktivitas

Dimensi menambah produktivitas mengacu pada peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan PKH melalui pemanfaatan data kependudukan yang akurat dan terintegrasi sehingga proses identifikasi KPM dapat dilakukan lebih cepat dan efisien.

1) Optimalisasi Ketersediaan Data

Ketersediaan data yang memadai berperan penting dalam menentukan penerima manfaat, mendukung perencanaan program, dan meningkatkan akurasi evaluasi. Pemanfaatan data dilakukan

melalui integrasi data Dukcapil dengan DTKS yang dikelola Dinas Sosial. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Dukcapil secara berkala melakukan pemutakhiran data kependudukan, seperti data kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Pemerintah Kabupaten Mukomuko juga menyediakan layanan daring Kuwau Padek (Kupakai Whatsapp untuk Pelayanan Kependudukan) guna memudahkan masyarakat memperbarui data kependudukan.

2) Akses Informasi Lebih Mudah

Data yang lengkap dan berkualitas mempermudah proses pengambilan keputusan, perencanaan program, serta evaluasi pelaksanaan PKH. Pemutakhiran data secara berkala membuat akses informasi menjadi lebih mudah karena petugas hanya perlu mencocokkan data dengan kondisi di lapangan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa DTKS dan data kependudukan yang selalu diperbarui memudahkan petugas dalam memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan serta mempercepat proses verifikasi dan validasi data.

Gambar 4.

Word Cloud Nvivo Dimensi Menambah Produktivitas



Sumber : diolah oleh penulis,2026

Berdasarkan Gambar 4. kata yang paling dominan adalah memastikan dan penerima. Selain itu, muncul kata-kata seperti kelayakan, pedoman, proses, standar, dan melaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa data kependudukan membantu memastikan penerima bantuan sesuai kriteria yang ditetapkan serta mendukung proses identifikasi, verifikasi, dan penetapan penerima manfaat secara lebih cepat, terarah, dan efisien. Data yang akurat dan terintegrasi juga meningkatkan produktivitas kerja petugas karena tidak perlu melakukan pendataan dari awal.

3.1.4 Mempertinggi Efektivitas

1) Menekan Angka Jumlah Penduduk Miskin

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan sosial bersyarat yang membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak. Bantuan ini membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sehingga kondisi ekonomi keluarga menjadi lebih stabil. Hasil wawancara menunjukkan bahwa PKH memberikan dampak positif dalam menekan angka kemiskinan di Kabupaten Mukomuko. Program ini membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, serta didukung oleh pendampingan rutin yang meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, PKH tidak hanya memberikan bantuan ekonomi, tetapi juga mendorong perubahan pola pikir masyarakat ke arah yang lebih baik.

Gambar 5.

Word Cloud Nvivo Dimensi Mempertinggi Efektivitas



Sumber : diolah oleh penulis, 2026

Berdasarkan Gambar 5. kata yang paling dominan adalah kemiskinan, membantu, dan PKH. Hal ini menunjukkan bahwa PKH berperan penting dalam membantu masyarakat miskin dan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Kata pendidikan, kesehatan, kebutuhan, dan masyarakat menunjukkan fokus PKH pada peningkatan kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Sementara itu, kata menekan dan menurun menunjukkan bahwa PKH berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan secara bertahap melalui bantuan dan pendampingan rutin sehingga masyarakat lebih mampu memenuhi kebutuhan dasar dan memahami pentingnya pendidikan serta kesehatan.

3.1.5 Mengembangkan Kinerja Pekerjaan

1) Pemahaman Arah dan Tujuan Program

Pemahaman terhadap arah dan tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi faktor penting dalam mengembangkan kinerja pelaksana program, khususnya pendamping PKH. Pemahaman yang baik terhadap tujuan program, yaitu meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin melalui pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, akan mendukung kualitas pelaksanaan program. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pendamping PKH di Kabupaten Mukomuko telah memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap tujuan program. Hal ini terlihat dari kemampuan pendamping dalam menjalankan tugas sesuai pedoman serta memberikan arahan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), seperti memastikan anak tetap bersekolah. Pemahaman tersebut mendukung kelancaran pelaksanaan PKH dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Gambar 6.

Word Cloud Nvivo Dimensi Mengembangkan Kinerja Pekerjaan



Sumber: diolah oleh penulis, 2026

Berdasarkan Gambar 6. kata-kata yang dominan adalah sosial, keluarga, dukcapil, kependudukan, kesejahteraan, dan Mukomuko. Dominasi kata tersebut menunjukkan bahwa pemahaman pelaksana program berkaitan erat dengan tujuan utama PKH, yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga penerima manfaat melalui dukungan data kependudukan. Kemunculan kata dinas, sosial, dan kependudukan menunjukkan pentingnya peran instansi pelaksana dalam memahami tujuan program agar pelaksanaan di lapangan berjalan sesuai arah kebijakan. Pemahaman

yang baik terhadap tujuan PKH membantu meningkatkan kualitas kerja pelaksana program sehingga tugas dapat dilaksanakan lebih terarah, terkoordinasi, dan sesuai pedoman.

Gambar 7.

Hasil Analisis Nvivo Pemanfaatan Data Kependudukan

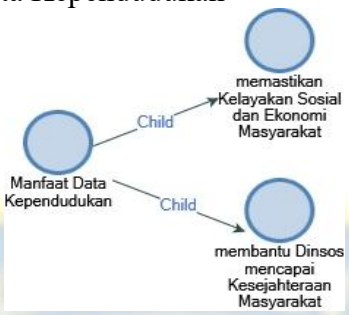

Sumber : diolah oleh penulis, 2026

Berdasarkan Gambar 7. hasil analisis NVivo menunjukkan bahwa lima dimensi dalam Teori Kemanfaatan Chin dan Todd (1995) memiliki keterkaitan langsung dengan dua manfaat utama data kependudukan, yaitu membantu Dinas Sosial mencapai kesejahteraan masyarakat dan memastikan kelayakan sosial serta ekonomi masyarakat. Pendataan PKH dilakukan melalui aplikasi SIKS-NG dengan mengacu pada data Dukcapil sehingga proses identifikasi calon penerima bantuan menjadi lebih cepat dan akurat. Secara empiris, pemanfaatan data kependudukan di Kabupaten Mukomuko menunjukkan adanya integrasi yang kuat antara Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Data NIK, Kartu Keluarga (KK), dan DTKS digunakan sebagai acuan utama dalam identifikasi dan verifikasi calon penerima bantuan. Pemanfaatan data kependudukan tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi telah menjadi dasar pengambilan keputusan dalam kebijakan sosial. Namun, masih diperlukan penguatan pada aspek pembaruan data, koordinasi antarinstansi, dan partisipasi masyarakat agar tujuan PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara berkelanjutan dan tepat sasaran.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan data kependudukan dalam mendukung Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Mukomuko telah berjalan dengan baik melalui integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pemanfaatan data tersebut memberikan kemudahan dalam proses pendataan, verifikasi, dan penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sehingga meningkatkan efisiensi serta ketepatan sasaran bantuan sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa data kependudukan telah menjadi fondasi utama dalam pengambilan keputusan program sosial dan membantu mengurangi potensi kesalahan penyaluran bantuan. Sama halnya dengan temuan Pratiwi dan Imsar (2022) yang menyatakan bahwa pelaksanaan bantuan sosial telah berjalan sesuai prosedur dan memerlukan dukungan pendataan yang berkelanjutan, penelitian ini juga menemukan bahwa akurasi data menjadi faktor kunci keberhasilan penyaluran bantuan sosial. Temuan ini juga memperkuat hasil penelitian Sembiring dan Nababan (2024) yang menyatakan bahwa pemanfaatan data kesejahteraan sosial memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan sosial.

Di sisi lain, penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat hambatan dalam pemanfaatan data kependudukan, terutama berupa rendahnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pembaruan data, perbedaan waktu pemutakhiran data antarinstansi, serta belum optimalnya sinkronisasi data antara Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan

kesalahan penargetan, baik *inclusion error* maupun *exclusion error* dalam penyaluran bantuan sosial. Temuan ini sejalan dengan penelitian Manoppo dan Laoh (2022) yang menemukan masih adanya keluarga mampu yang tercantum dalam DTKS dan keluarga miskin yang belum terdaftar akibat kurang optimalnya pembaruan data. Selain itu, temuan ini juga sama dengan hasil penelitian Sembiring dan Nababan (2024) yang menunjukkan bahwa validasi data masih menjadi tantangan dalam meningkatkan efektivitas bantuan sosial. Namun demikian, penelitian ini menemukan adanya upaya yang cukup baik dari pemerintah daerah melalui peningkatan sosialisasi, koordinasi antarinstansi, *monitoring* rutin, serta penguatan integrasi data kependudukan untuk memastikan bantuan PKH lebih tepat sasaran. Temuan ini memperkuat penelitian Herlambang dan Wicaksono (2025) bahwa keberhasilan program bantuan sosial sangat dipengaruhi oleh kualitas pendataan dan validasi data penerima manfaat.

3.3 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan bahwa keberhasilan pemanfaatan data kependudukan dalam mendukung Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Mukomuko didukung oleh adanya integrasi data antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Dinas Sosial melalui pemanfaatan NIK, KK, dan DTKS yang mempercepat proses verifikasi serta meningkatkan ketepatan sasaran bantuan. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa faktor penghambat, yaitu rendahnya partisipasi masyarakat dalam memperbarui data kependudukan, ketidaksinkronan data antarinstansi, masih adanya duplikasi dan ketidaksesuaian data, serta keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pembaruan data. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan PKH tidak hanya ditentukan oleh kualitas sistem data, tetapi juga oleh koordinasi lintas instansi dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pemutakhiran data.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa pemanfaatan data kependudukan melalui integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) telah mendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Mukomuko dengan mempermudah proses pendataan, verifikasi, dan penetapan Keluarga Penerima Manfaat sehingga penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran dan efisien. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa perbedaan waktu pembaruan data antarinstansi, rendahnya partisipasi masyarakat dalam memperbarui data kependudukan, serta keterbatasan pendampingan di lapangan, sehingga diperlukan penguatan koordinasi, pemutakhiran data secara berkelanjutan, dan peningkatan sosialisasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan data kependudukan dalam mendukung PKH.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan di Kabupaten Mukomuko dengan pendekatan kualitatif, sehingga hasil penelitian menggambarkan kondisi pada lokasi dan waktu penelitian tertentu. Selain itu, data yang diperoleh sangat bergantung pada hasil wawancara dan dokumen yang tersedia dari Dinas Sosial serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*). Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji pemanfaatan data kependudukan dalam program bantuan sosial pada daerah lain atau membandingkan beberapa wilayah agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif. Penelitian berikutnya juga dapat

berfokus pada efektivitas integrasi data, sinkronisasi antarinstansi, serta partisipasi masyarakat dalam pembaruan data kependudukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran Program Keluarga Harapan (PKH).

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko, serta seluruh informan dan pihak terkait yang telah memberikan izin, bantuan, data, dan dukungan selama pelaksanaan penelitian mengenai pemanfaatan data kependudukan dalam mendukung Program Keluarga Harapan di Kabupaten Mukomuko. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Bakri, R., Sagrim, B., Rimba, A. S., & Jeddawi, M. (2021). Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bone. *Jurnal Pallangga Praja (JPP), 2*(2), 138–148. https://ejournal.ipdn.ac.id/jpp/article/view/1530

Bryan, G., Chowdhury, S., Mobarak, A. M., Morten, M., & Smits, J. (2023). Encouragement and distortionary effects of conditional cash transfers. *Journal of Public Economics, 228*, Article 105004. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2023.105004

Cahyadi, N., Hanna, R., Olken, B. A., Prima, R. A., Satriawan, E., & Syamsulhakim, E. (2020). Cumulative impacts of conditional cash transfer programs: Experimental evidence from Indonesia. *American Economic Journal: Economic Policy, 12*(4), 88–110. https://doi.org/10.1257/pol.20190245

Chin, W. W., & Todd, P. A. (1995). On the use, usefulness, and ease of use of structural equation modeling in MIS research: A note of caution. *MIS Quarterly: Management Information Systems, 19*(2), 237–246. http://dx.doi.org/10.2307/249690

Fitrinitia, & Matsuyuki. (2023). Social protection for climate-disasters: A case study of the Program Keluarga Harapan cash transfer program for smallholder farm household in Indonesia. *Progress in Disaster Science, 17*, Article 100278. https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2023.100278

Herlambang, B. A., & Wicaksono, I. (2025). Evaluasi kebijakan bantuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Slawu, Kabupaten Jember. *Jurnal Interelasi, 1*(4), 264–275. https://journal.interelasi.org/index.php/interelasihumaniora/article/view/138/35

Hutasoit, I. (2017). *Pengantar ilmu kependudukan*. Alfabeta.

Ismail, M. G. S., & Ismail. (2022). Implementasi kebijakan pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut. *Jurnal Registratie, 4*(1). https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnalregistratie/article/view/2429

Jaftoran, F., Kansil, D., Pusung, P. H., Suraji, Bura, A. F., Sumampouw, A. A., Toheba, S., Visvanitra, N. P. V., Watung, A. J., & Wirayudha, S. (2025). Socialization of digital identity in raising awareness of population administration ownership in Kaima Village, Kauditan District, North Minahasa. *Civitas Consecratio, 5*(2), 125–134. https://ejournal.ipdn.ac.id/cc/article/view/5509

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.*

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.*

Manoppo, E. V., & Laoh, N. A. (2022). Strategi pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam penyaluran bantuan sosial RS-RTLH oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Konstituen, 4*(1), 25–39. https://doi.org/10.33701/jk.v4i1.2598

Novella, Y., & Mardhatillah, Y. (2022). Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng. *Jurnal Konstituen, 4*(2). https://doi.org/10.33701/jk.v4i2.2836

Nurrahman, A., Sabaruddin, S., Nurnawati, E. N., & Guntoro, D. (2025). Efektivitas program identitas kependudukan digital di Kabupaten Ciamis. *Jurnal Registratie, 7*(2). https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v7i2.5942

Pratiwi, D. C., & Imsar, I. (2022). Analisis penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dinas Sosial pada masyarakat Kabupaten Batu Bara. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 4*(12), 5684–5690. https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/2122

Ripa'i, A. (2018). Penerapan sistem informasi administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi menuju *single identity number* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Dukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil), 6*(1). https://ejournal.ipdn.ac.id/JKCS/article/view/372

Salsabila, N., Muna, N., Pradana, V. H., & Nurcahya, W. F. (2024). Analisis efektivitas bantuan sosial (bansos) dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development, 1*(4), 1–13. https://economics.pubmedia.id/index.php/jmsd/article/view/317

Sembiring, F. F. B., & Nababan, R. (2024). Data Terpadu Kesejahteraan Sosial terhadap bantuan sosial bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat Kelurahan Simpang Selayang. *Innovative: Journal of Social Science Research, 4*(5), 6779–6790. https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/15559

Sugiyono. (2024). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Sumual, R., Poli, A., Basir, H., & Pabisa, D. (2024). The effectiveness of the family planning program in controlling the population growth rate in North Minahasa Regency, North Sulawesi Province. *Jurnal Registratie, 6*(2), 140–154. https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnalregistratie/article/view/4943

Suparman, N., Washillah, G., & Juana, T. (2021). Efektivitas penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi masyarakat miskin terdampak Covid-19. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial, 19*(2), 44–60. https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i2.6

Tohari, A., Parsons, C., & Rammohan, A. (2019). Targeting poverty under complementarities: Evidence from Indonesia's unified targeting system. *Journal of Development Economics, 140*, 127–144. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2019.06.002

Yuliani, E. & Nasrudin, R. (2024). The effects of the Indonesian conditional cash transfer program on transition out of agriculture. *World Development, 173*, Article 106425. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2023.106425